

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAAN
BANTUAN SOSIAL DI MASA PASCA PANDEMI COVID-19:
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Disusun Oleh:

Umara islahiya Javier (2316041102)

Dosen Pengampu:

Pof.Dr. Novita Tresiana



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial di Masa Pasca Pandemi Covid-19” dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya untuk memahami dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dilakukan pada masa pasca pandemi Covid-19, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi Covid-19.

Bandar Lampung, Oktober 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah menerapkan berbagai kebijakan bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Selama masa pandemi, program bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, setelah masa darurat pandemi berakhir, muncul tantangan baru dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pada masa pasca pandemi. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian sasaran penerima, mekanisme distribusi, validitas data, serta efektivitas pelaksanaan program agar tetap tepat guna dan tepat sasaran.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga mengalami dinamika dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Meskipun berbagai program bantuan telah disalurkan, masih ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran, serta kurangnya transparansi dan koordinasi antar lembaga pelaksana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pengalaman dan persepsi berbagai pihak, seperti aparatur pemerintah, pelaksana program, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan bantuan sosial ke depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian

administrasi publik dan kebijakan sosial, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan bantuan sosial tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk menilai efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi.
4. Untuk memahami persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi, serta memperkaya literatur tentang efektivitas kebijakan sosial dalam konteks pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam

perbaikan kebijakan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan berkeadilan.

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, kontrol sosial, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam program bantuan sosial.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis di bidang kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

1.4.3 Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat rasa keadilan, kepedulian sosial, dan solidaritas antarwarga pasca pandemi. Dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah dan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan bantuan sosial telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu bagi kepentingan masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan sumber daya negara agar tepat sasaran.

Penelitian oleh Wahyudi (2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menghadapi berbagai kendala, seperti validitas data penerima, tumpang tindih program, serta kurangnya transparansi distribusi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Sari dan Putra (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan bansos sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Sementara itu, penelitian Rahman (2023) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan di masa pasca pandemi untuk memastikan bahwa program yang telah berjalan tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial memerlukan evaluasi berkelanjutan, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk upaya akademik untuk menilai efektivitas dan tantangan kebijakan tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Kebijakan publik mencakup seluruh keputusan, tindakan, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dalam mengatur kehidupan

masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan bantuan sosial merupakan bentuk kebijakan publik yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn (2018) terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Perumusan masalah (problem formulation)
2. Penyusunan agenda (agenda setting)
3. Formulasi kebijakan (policy formulation)
4. Implementasi kebijakan (policy implementation)
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Tahap terakhir, yaitu evaluasi kebijakan, menjadi fokus utama penelitian ini, karena melalui evaluasi dapat diketahui efektivitas, efisiensi, serta dampak sosial dari pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

2.2.2 Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2018), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kinerja kebijakan publik, baik dari segi proses, keluaran (output), maupun hasil (outcome). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan?
2. Apakah pelaksanaannya efektif dan efisien?
3. Apakah kebijakan memberikan dampak positif terhadap masyarakat?

Dalam konteks bantuan sosial, evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana program bantuan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

2.2.3 Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik menjelaskan bagaimana lembaga pemerintah melaksanakan kebijakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Siagian (2014), administrasi publik adalah keseluruhan proses kerja sama antara aparatur negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial sangat bergantung pada kapasitas aparatur publik, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi.

2.2.4 Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup layak dan bermartabat. Menurut Suharto (2019), kesejahteraan sosial mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan. Kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan bantuan sosial perlu memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 menghadapi berbagai tantangan, seperti efektivitas penyaluran, akurasi data penerima, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan evaluasi kebijakan publik, penelitian ini mencoba menilai sejauh mana kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan Bantuan Sosial → Pelaksanaan Program → Faktor Pendukung dan Penghambat → Evaluasi Pelaksanaan → Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur logika yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir disusun berdasarkan teori kebijakan publik, teori evaluasi kebijakan, serta konsep kesejahteraan sosial yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat yang terdampak, menjaga stabilitas sosial, dan menekan angka kemiskinan. Namun, setelah masa pandemi berakhir, muncul tantangan baru dalam pelaksanaan bantuan sosial, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pelaksana.

Melalui proses evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program bantuan sosial berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan meliputi analisis terhadap input, proses, output, dan outcome

kebijakan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program.

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung akan dievaluasi dari tiga aspek utama:

1. Proses pelaksanaan – mencakup mekanisme distribusi, koordinasi antar lembaga, dan pelibatan masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat – seperti dukungan anggaran, kapasitas aparatur, serta keakuratan data penerima.
3. Dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat – sejauh mana kebijakan tersebut mampu membantu masyarakat pasca pandemi.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pandangan dari pihak pelaksana (pemerintah daerah, aparat kelurahan, Dinas Sosial) dan penerima manfaat, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan bantuan sosial di Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan agar program bantuan sosial di masa depan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di masa pasca pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif para pelaksana dan penerima kebijakan.

Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas, hambatan, dan dampak kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu daerah perkotaan yang memiliki jumlah penerima bantuan sosial cukup tinggi dan menjadi fokus distribusi program pemerintah pasca pandemi. Selain itu, Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks evaluasi kebijakan bantuan sosial.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama bulan Oktober hingga Desember 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan informan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan dinas sosial, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian dan literatur yang relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan terhadap informan kunci seperti aparatur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,

aparatur kelurahan, dan masyarakat penerima bantuan sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi lebih dalam terkait pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

2. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyaluran bantuan sosial, termasuk mekanisme distribusi, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta kondisi penerima manfaat di lapangan.

3. Dokumentasi

Meliputi pengumpulan data sekunder seperti laporan kegiatan, data penerima bantuan, kebijakan pemerintah, serta foto kegiatan yang relevan untuk mendukung hasil penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pejabat atau staf Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang menangani program bantuan sosial.
2. Aparatur kelurahan/desa yang terlibat dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial.
3. Masyarakat penerima manfaat bantuan sosial di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, karena dalam penelitian kualitatif jumlah informan disesuaikan dengan prinsip ketercukupan data (data saturation) ,yaitu ketika data yang diperoleh sudah dianggap memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap ini dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar temuan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola temuan, kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut dengan data tambahan hingga diperoleh hasil akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Keabsahan Data (Validitas Data)

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memeriksa data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu.

Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan cara untuk meningkatkan validitas hasil penelitian kualitatif. Jenis triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber – membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan (pemerintah dan masyarakat).
2. Triangulasi teknik – membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu – melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi.

3.8 Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan: Menentukan fokus penelitian, menyusun instrumen wawancara, dan memperoleh izin penelitian.
2. Tahap Pengumpulan Data: Melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian.
3. Tahap Analisis Data: Mengolah dan menganalisis data menggunakan teknik kualitatif.
4. Tahap Penyusunan Laporan: Menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan akhir sesuai pedoman penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson Education.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rahman, A. (2023). Evaluasi Program Bantuan Sosial Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 12(2), 145–158.

Sari, D., & Putra, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 205–216.

Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2019). *Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak COVID-19 di Daerah Perkotaan. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 55–67.